

**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN
MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**MAKDALENA USAT
NPM. 202142002**



**FAKULTAS EKONOMI
EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS KALTARA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERAN PMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
EKONMI PEDESAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH**

Nama : Makdalena Usat
Nim : 202142002
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Penguji Sidang Skripsi

Pembimbing

Nurus Soimah, S.Pd., M.Ec.Dev
NIDN. 11.150490.01

Penguji 1

Penguji 2

Machmud Al Amrie, S.E., M.Pd
NIDN. 11.040469.01

Suud Ema Fauziah, S.E., S.H., M.Hp.,M.M
NIDN. 11.100876.01

Mengetahui

Dekan Fakutas Ekonomi

**Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan**

Dewi Qomariah Imelda, S.E.,M.M.Ak
NIDN : 11.0505.73.02

Nurus Soimah, S.Pd., M.Ec.Dev
NIDN : 11.150490.01

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PERAN PMERINTAH DESA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONMI PEDESAAN
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Disusun Oleh : Makdalena Usat

Nim. 202142002

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana Pada
Tanggal 16 Juli 2025

TIM PENGUJI

Pembimbing : Nurus Soimah, S.Pd., M.Ec.Dev
NIDN. 11.150490.01

Penguji 1 : Machmud Al Amrie, S.E., M.Pd
NIDN. 11.040469.01

Penguji 2 : Suud Ema Fauziah, S.E., S.H., M.Hp.,M.M
NIDN. 11.100876

Universitas Kaltara
Program Sarjana
Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Kaltara
Program Sarjana
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dewi Qomariah Imelda, S.E.,M.M.Ak
NIDN : 11.0505.73.02

Nurus Soimah, S.Pd., M.Ec.Dev
NIDN : 11.150490.01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Makdalena Usat

Nim : 2021142002

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang saya tulis ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil menjiplak atau plagiat dan belum pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan lembaga dan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Tanjung Selor, 08 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan

Makdalena Usat

MOTTO

“terlahir dari keluarga sederhana tidak menghalangiku untuk bisa meraih cita-cita ku”

“Direndahkan dimata manusia.ditinggikan dimata TUHAN”

“Aku memulai dengan nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata amin”

“jangan takut, percaya saja”

(markus 5:36)

“diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan”

(Yeremia 17:7)

“aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada

rencana-Mu yang gagal”

(Ayub 42:2)

“hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas Dia,
hendaklah kamu

bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur”

(kolose 2:7)”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa, karena dengan Berkat Rahmat Dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dewi Qomariah Imelda selaku Dekan Fakultas Ekonomi
2. Ibu Nurus Soimah selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi saya, yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan arahan serta bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Machmud Al Amrie selaku pembimbing akademik penulis dan seluruh staf TU Fakultas Ekonomi yang dengan sabarnya membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi terkait skripsi.
4. Teristimewah kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Usat Imang dan ibunda Bua Langet yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada saya dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Terimakasih kepada kelima saudara/I saya Elisabet Usat S.H, Hendrik Usat S,Th, Juni Usat S,Th, Apriati Usat Dan Ester Usat Beserta Keponakan Tercinta Jhonatan Dan Jaffarel.

5. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 ekonomi pembangunan Nur Atikah, Yusran, Dan Septi, serta seluruh teman-teman yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung.
6. Terimakasih untuk sahabat terbaik penulis saudari Afriyani Benyamin yang begitu setia menemani penulis berproses, serta memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih kepada kekasih tercinta Pratu Jemmy Agustinus yang tidak henti-hentinya memberikan support, dan masukan serta membantu penulis dalam bentuk material, serta setia menunggu penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian di dalam penulisan skripsi ini pada khususnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pendesaan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah desa memiliki peran strategi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam mendukung pelaku umkm agar lebih berkembang dan mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Tengkapak.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan, memfasilitasi perizinan, serta membantu akses pemasaran dan permodalan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum maksimal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

Kata kunci : peran pemerintah desa; pemberdayaan ekonomi; pengembangan UMKM

ABSTRACT

This study aims to understand the role of the village government in mepowering the rural economy through the development of micro, small, and medium enterprises. The village government has a strategic role as a facilitator, regulator, and catalyst in helping MSME actors grow and become more independent. This research uses a qualitative with a case study method conducted in Tengkapak Village.

Date were collected through interviews, observations, and documentation. The result shiw that the village government has made various efforts such as providing training, facilitating business permits, and helping wit marketing and fundimng acces. However, the implementation of these roles is still not optimal due to limited resources and lack of coordination with relevant parties.

Keywords : role of village government; economic empowerment;MSME development

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTARCT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Peran Pemerintah.....	8
2.1.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM	13
2.1.3 Pemberdayaan Ekonomi	14
2.1.4 Ekonomi Pedesaan	16
2.1.5 Ciri-Ciri Ekonomi	23
2.1.6 Definisi UMKM	24
2.2 Kajian Empiris	28
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37

3.2 Sumber Data	38
3.2.1 Data Primer	38
3.2.2 Data Sekunder	38
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1 Wawancara	39
3.4.2 Survei/Kuesioner	40
3.4.3 Dokumentasi.....	40
3.5 Teknik Analisa Data	40
3.6 Triangulasi Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah Desa	44
4.1.2 Kondisi Desa	45
4.1.3 Demografi Desa	45
4.2 Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Umkm	47
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Desa	53
4.4 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Table 2.2 Penelitian Terdahulu	28
Table 4.1 Golongan Umur	46
Table 4.2 Mata Pencarian.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	60
Lampiran 2	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Salah satu cara yang paling efektif untuk mendorong ekonomi masyarakat desa adalah dengan mengembangkan UMKM. UMKM bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan keluarga, dan memanfaatkan potensi lokal desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan UMKM, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa seharusnya bisa menjadi fasilitator, regulator dan katalisator. Sebagian pemerintah desa belum punya program khusus untuk pemberdayaan dan fokus dana desa masih banyak digunakan untuk infrastruktur fisik, bukan pengembangan usaha masyarakat

Padahal, menurut peraturan Menteri desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, pemerintah desa didorong untuk menggunakan dana desa untuk pemulihan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang sebagaimana di maksud dalam UU tersebut.

Menurut Rusda, Jaya, W. Adda (2023) ada beberapa permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya bimbingan dan pembinaan, keterbatasan pengetahuan teknologi, permodalan, infrastruktur yang belum memadai, sulitnya memperoleh izin usaha atau badan hukum, dan keterbatasan dalam pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memaksimalkan potensi UMKM.

Seperti yang diketahui melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan yang berfokus pada pengembangan UMKM, pemerintah berupaya menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Hal ini sama dengan tujuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian penting bagi perekonomian suatu negara maupun daerah, tanpa terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara terkhususnya Kabupaten Bulungan sendiri. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang dimana ibu kotanya terletak di Kecamatan Tanjung Selor, dan juga merupakan ibu kota provinsi.

Diketahui Kabupaten Bulungan memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya : perikanan, peternakan, pertambangan dan migas, kawasan ketahanan pangan, serta pertanian. Kabupaten Bulungan memiliki ciri khas antara lain kerajinan tangan dari suku Dayak kenyah berupa pakaian adat, saung, gai (anjat), tampi, keranjang dsb yang dapat di perjual belikan.

Menurut Soimah dan Imelda (2023), permasalahan yang utama yang dihadapi UMKM dimasa pandemic covid-19 yaitu penurunan penjualan akibat adanya pandemi maupun akibat dari kebijakan penanggulangannya menyebabkan menurunnya omset usaha yang berakibat kepada perputaran modal yang sedikit terhambat. Selain itu juga ada permasalahan hambatan distribusi produk dan sulitnya mendapatkan bahan baku usaha.

Seperti yang diketahui bahwa UMKM memiliki karakteristik yang sangat unik dikarenakan jumlahnya yang mendominasi di dalam struktur perekonomian dan terus bertambah disetiap tahunnya. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM salah satunya dengan perluasan akses pembiayaan UMKM. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah belum semua pelaku UMKM memiliki surat izin usaha yang notabennya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah .

Menurut Soimah (2023), di Kabupaten Bulungan 18,05% pemilik usaha mengalami permasalahan terkait dengan legalitas usaha, permasalahan ini diakibatkan oleh kurangnya informasi terkait pengurusan izin usaha. Pemilik usaha memiliki anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha sangat rumit.

Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan edukasi terkait seberapa penting surat izin usaha bagi setiap pelaku UMKM dalam pengembangan usaha masyarakat Kabupaten Bulungan. Tentunya tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar pelaku usaha mampu memahami dan mengetahui seberapa penting legalitas usaha dan manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha.

Keberadaan UMKM hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam upaya

penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada apabila dikelola dengan baik, maka dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM antara lain:

1. Peningkatan akses pembiayaan : Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Digitalisasi UMKM : pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM
3. Penguatan infrastruktur dan akses pasar
4. Inovasi dan teknologi

Menurut Soimah , Messi, Imelda (2022) kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat pandemi *covid-19* yaitu dengan memberikan bantuan stimulus dan pengembangannya. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan utara, pemerintah wajib memperhatikan setiap permasalahan dari setiap pelaku UMKM dan memberikan pendampingan melalui stimulus.

Desa Tengkapak merupakan salah satu desa yang terletak di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Tanjung Selor. Desa Tengkapak terletak sangat strategis dikarenakan posisi berada di tengah-tengah desa tetangga, walaupun dengan kondisi lahan yang terbilang tidak subur, namun warga Desa Tengkapak membuktikan peningkatan pendapatan ekonomi dengan cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada.

Di Desa Tengkapak juga memiliki beberapa jenis UMKM yang dapatkan di tingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain dan menjadi ikon Desa Tengkapak. Melalui cara pengembangan potensi lokal yang bergerak dalam bidang UMKM, ada beberapa yang menjadi unggulan Desa Tengkapak adalah catering dan kerajinan tangan, berupa sa'ung, gai (anjat), pakaian adat, tampi, keranjang dsb.

Tentunya dari beberapa pelaku UMKM di Desa Tengkapak memiliki permasalahannya masing-masing, seperti kurangnya perhatian dari pemerintah desa berupa pelatihan atau sosialisai mengenai UMKM, sulit mendistribusikan barang, modal yang terbatas, tidak memiliki surat izin usaha, kurangnya inovasi produk dsb.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi ?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam memberdayakan ekonomi melalui pengembangan UMKM sudah efektif ?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi peran pemerintah : Memahami peran dan tanggungjawab pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di pedesaan, termasuk kebijakan , program, dan regulasi yang di terapkan.
2. Mengidentifikasi strategi pemerintah : evaluasi efektivitas strategi mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan penurunan angka kemiskinan.

3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat : untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui UMKM , baik dari segi kebijakan maupun implementasi di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah : penelitian ini dapat menjadi panduan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan umkm yang lebih terarah dan efektif.
 - b. Bagi masyarakat pedesaan : memberikan pemahaman melalui pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan umkm .
2. Manfaat untuk peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian ini dapat menjadi landasan teori untuk studi lanjutan yang mengeksplorasi aspek-aspek lain dari pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, seperti inovasi digitalisasi, atau kolaborasi antar sector.
 - b. Memfasilitasi penelitian tentang model kebijakan baru yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan global.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan lembaga atau instansi dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai pelayan publik yang mensejahterakan masyarakat. Menurut Musran minusu, 2010 dalam Siti Turyani M, 2019, untuk dapat menjalankan perannya sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, UMKM harus memperluas basis ekonomi serta meningkatkan laju pertumbuhan pendapatannya dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung UMKM. Contohnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang mengatur tentang klasifikasi UMKM, hak dan kewajiban, serta dukungan pemerintah. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan mendorong ekosistem yang mendukung bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti pengalokasian minimal 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM juga mendorong keberpihakan yang konkret terhadap pelaku usaha kecil.

Dalam hal pendanaan dan akses permodalan, pemerintah turut menghadirkan berbagai program pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku umkm, seperti kredit usaha rakyat (KUR). Program KUR menawarkan bunga rendah dan proses pengajuan yang disederhanakan, sehingga UMKM memiliki alternatif permodalan selain dari Lembaga keuangan. Kementrian koordinator bidang perekonomian (2024)

mengatakan, Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp.295 Triliun, yang merupakan salah satu bentuk nyata dukungan finansial terhadap umkm.

Dalam menghadapi era digital, pemerintah berperan dalam transformasi digital umkm. Melalui program seperti Gerakan Nasional bangga buatan Indonesia (Garnas BBI), pelaku umk didorong untuk masuk platform digital seperti marketplace dan media social. Hal ini tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Kominfo (2023) Data dari kementerian komunikasi dan informatika menunjukkan bahwa lebih dari 22 Juta UMKM telah terdigitalisasi hingga akhir tahun 2023. Digitalisasi dianggap sebagai kunci bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan.

Keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit ataupun sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan kepada UMKM. Menurut Gede Diva Dalam Anam (2019), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

1) Pengertian Fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan untuk membantu sekelompok individu atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu, dan memecahkan masalah, fasilitator tidak memberikan solusi langsung tetapi memandu proses agar berjalan dengan lancar, efisien, dan produktif.

Kementerian koperasi dan UMKM (2020) pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas usah mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Peran ini mencakup penyediaan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan lainnya.

Peran pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya memfasilitasi saja, tetapi juga berperan dalam mempromosikan produk UMKM melalui berbagai platform, seperti pameran, expo, dan media social. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran dan permintaan produk-produk UMKM.

2) Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan, merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi lokal. Sebagai fasilitator, pemerintah tidak bertindak sebagai pelaku utama pembangunan, melainkan lebih kepada penyedia ruang, peluang, dan sarana pendukung agar masyarakat mampu berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Di desa, peran fasilitator pemerintah biasanya diemban oleh pemerintah desa atau aparat yang diberi tanggung jawab dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, kepala desa dan perangkatnya mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi warga, mendampingi proses pengurusan izin usaha mikro, atau membentuk dan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai wadah usaha kolektif yang melibatkan masyarakat.

3) Tujuan Pemerintah Sebagai Fasilitator

Tujuan utama dari peran pemerintah sebagai fasilitator adalah mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya

melalui penguatan ekonomi lokal. Dalam hal ini, kemandirian bukan hanya berarti tidak tergantung pada bantuan luar, tetapi juga mampu menciptakan dan mengelola kegiatan ekonomi berkelanjutan.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator adalah suatu perangkat, lembaga atau individu yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa suatu sistem, proses, atau industri berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau hukum yang telah ditetapkan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan seperti perizinan usaha dan perjakan, sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar berjalan dengan lancar secara efektif dan efisien. Pemerintah juga mengawasi terjadinya kegiatan monopoli dan mempromosikan persaingan yang sehat, serta mengembangkan kerja dengan pihak lain seperti swasta dan masyarakat sipil, guna mendukung pengembangan UMKM.

Dan memberikan akses keuangan melalui kredit dan pinjaman, mendukung pengembangan UMKM melalui perizinan usaha dan pajak serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pendampingan. menurut siagian (2019), regulator adalah pihak yang bertugas menyusun kebijakan dan aturan guna mengatur perilaku masyarakat dalam system tertentu, sehingga tercipta keteraturan dan keseimbangan. Dalam konteks pembanguna ekonomi, khususnya di tingkat pedesaan,

peran regulator menjadi penting untuk mengatur pola relasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri.

Peran pemerintah sebagai regulator juga menuntut pemerintah untuk menciptakan peraturan yang bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tanpa regulasi yang tepat, pembangunan ekonomi beresiko tidak terarah dan menimbulkan ketimpangan.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual).

Usman dan Sunyoto (2004) pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, di simpulkan bahwa :

- a) Sudah ada dana bantuan modal usaha berupa pinjaman atau kredit usaha kepada pelaku UMKM, namun masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui hal tersebut sehingga belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
- b) Belum optimalnya pembangunan prasarana untuk mendukung kegiatan UMKM.
- c) Masih belum adanya pemberian saran pemasaran secara nyata kepada pelaku UMKM dalam bidang pemasaran, masih hanya seputar pelatihan dan pameran-pameran yang diadakan.

- d) Sudah sering dilakukan pelatihan-pelatihan kerajinan tangan namun hanya tertuju kepada ibu rumah tangga.
- e) Adanya pelatihan kelembagaan guna kemandirian pelaku UMKM namun masih pelaku umkm tidak menrapkan hasil dari pelatihan tersebut.

2.1.2 kebijakan pemerintah dalam pemeberdayaan umkm

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di indonesia. Hal ini di karenakan UMKM merupaka unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesiaa pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27 ayat (2), pasal 33, UU no. 9 tahun 1995. Harapan pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrument dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM.

Kebijakan pemerintah dalam UMKM di Indonesia bertujuan untuk melindungi dan memberdayaan UMKM melalui berbagai manfaat dan keringana. Berdasarkan peraturan pemerinta (PP) no.7 tahun 2021, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemeberdayaan UMKM dengan memberikan manfaat dan keringanan yang tidak tersedia bagi pelaku usaha besar, seperti bantuan hukum tanpa di pungut biaya untuk usaha mikro dan kecil.

Kebijakan pemerintah juga difokuskan pada pengembangan umkm melalui fasilitas pihak eksternal dan internal. Fasilitasi ini dapat berupa palatihan, pendampingan, dan akses kesumber daya keuangan. Pemerintah juga berperan dalam

meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku umkm melalui program-program pelatihan dan pengembangan.

Kebijakan pemerintah dalam UMKM juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi umkm terhadap perekonomian nasional. Umkm memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing umkm melalui berbagai program dan kebijakan.

Anggraeni, ningtiyas, dan nurdiyah 2021 menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan umkm adalah pemerintah memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, pengembangan usaha melalui pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan, bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha, adanya koordinasi dan pengendalian dari pemerintah.

2.1.3 Pemberdayaan Ekonomi

pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran individu atau kelompok dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan melibatkan pemberian kekuasaan dan sumber daya kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang efektif dalam mencapai tujuan mereka. Dengan demikian, individu atau kelompok dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses membangun kapasitas atau kelompok untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang

relevan dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Pemberdayaan juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak dan martabat individu atau kelompok, sehingga mereka dapat merasa percaya diri dan memiliki control atau kehidupan mereka.

Dalam konteks social dan ekonomi, pemberdayaan seringkali dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan ekonomi lokal, Pendidikan, dan kesehatan. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan mengontrol kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pemberdayaan juga dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat menjadi lebih aktif dan efektif dalam mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan.

a. Peningkatan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur ekonomi

Salah satu dimensi dari pemberdayaan ekonomi pedesaan adalah peningkatan akses terhadap berbagai sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat desa. Hal ini mencakup akses terhadap modal usaha, teknologi produksi, informasi pasar, dan infrastruktur seperti jalan, listrik, serta jaringan komunikasi. Ketika akses di perluas, maka produktifitas dan efisiensi usaha kecil di desa pun akan meningkat.

Selain itu, pemerintah juga dapat menghubungkan umkm dengan Lembaga-lembaga pendukung seperti koperasi, Lembaga keuangan mikro, atau marketplace digital. Dengan hubungan ini, pelaku usaha desa tidak lagi bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem usaha yang lebih besar dan saling mendukung.

b. Meningkatkan kapabilitas kewirausahaan masyarakat desa

Pemberdayaan juga menekankan pada pembangunan kapasitas kewirausahaan masyarakat desa, bukan hanya melalui pelatihan teknis tetapi juga pembentukan mentalitas usaha yang Tangguh. Banyak masyarakat desa yang memiliki potensi namun belum memiliki keberanian atau keterampilan untuk memulai usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program pengembangan kewirausahaan yang menyeluruh.

c. Upaya sistematis pemerintah untuk mendorong kemandirian umkm

Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan umkm sebagai penggerak ekonomi desa. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah merancang kebijakan yang berpihak pada umkm. Seperti penyederhanaan perizinan usaha, insentif fiskal, hingga pengadaan pelatihan kewirausahaan. Langkah-langkah ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis.

2.1.4 Ekonomi Pedesaan

Ekonomi pedesaan adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pedesaan, yang umumnya bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam lokal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas ekonomi pedesaan biasanya mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, dan usaha kecil

menengah, dengan berbagai karakteristiknya masing-masing seperti penggunaan teknologi sederhana, modal usaha yang terbatas, dan keterkaitan erat dengan budaya lokal.

Kementerian Pertanian (2020) Tujuan ekonomi pedesaan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di pedesaan. Ekonomi pedesaan mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam, dalam mengelola potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberlanjutan dan pembangunan ekonomi pedesaan sering menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Suharjo (2019), tantangan ekonomi pedesaan meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses ke pasar, rendahnya Pendidikan dan keterampilan, serta perubahan iklim. Tantangan ekonomi pedesaan sangat multifaset, salah satunya keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, yang menghambat akses pasar, dan layanan dasar lainnya. Kondisi seperti ini menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pertanian (2020) untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi pengembangan ekonomi pedesaan yang komprehensif. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur, teknologi dan pelatihan. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pengembangan ekonomi pedesaan dapat dimulai dengan peningkatan produksi pertanian melalui teknologi dan inovasi. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan bantuan teknis

kepada petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan juga sangat penting.

Selain itu, promosi produk lokal dan pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dalam jangka Panjang, pengembangan ekonomi pedesaan juga memerlukan perencanaan strategis dan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1) Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi merupakan jumlah keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh individu, rumah tangga, perusahaan, atau negara dalam suatu periode tertentu dan berbagai aktivitas ekonomi. Pendapatan ini bisa bersumber dari upah kerja, laba usaha, sewa tanah atau property, serta bunga atas modal yang ditanamkan. Dalam ilmu ekonomi makro, pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Menurut Mankiw (2012), pendapatan nasional dan produk domestik bruto (PDB) mencerminkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu.

Pendapatan ekonomi secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan pribadi dan pendapatan nasional. Pendapatan pribadi adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh individu setelah dikurangi pajak langsung, sedangkan pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi milik warga negara. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa pendapatan nasional mencerminkan kontribusi faktor-faktor produksi milik masyarakat, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

2) Pendapatan ekonomi pedesaan

Pendapatan ekonomi pedesaan mengacu pada seluruh penghasilan yang diperoleh oleh penduduk di wilayah pedesaan dari berbagai aktivitas ekonomi, baik dari sector pertanian maupun non-pertanian. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sector pertanian masih menjadi sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan. Menurut Todaro dan Smith (2011), sebagian besar penduduk pedesaan di negara berkembang bergantung pada pertanian subsisten, dengan pendapatan yang cenderung rendah dan tidak stabil akibat ketergantungan pada kondisi alam dan fluktuasi harga pasar.

Peningkatan pendapatan ekonomi pedesaan sangat penting dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan wilayah desa. Kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, akses terhadap kredit usaha tani, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan.

Menurut BPS (2023). Sebagian besar penduduk desa masih bergantung pada sector pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Umum, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran aktivitas ekonomi di desa, dimana masyarakat mulai mengembangkan sector non-pertanian sebagai penunjang pendapatan keluarga, seperti kerajinan, perdagangan, dan jasa.

Menurut Mulyadi dan Nurlela (2021), Peningkatan pendapatan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain akses terhadap pasar, ketersediaan modal, keterampilan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang memadai. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui berbagai program

pemberdayaan dan bantuan usaha juga turut menentukan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan, pendapatan masyarakat desa tidak hanya mencerminkan hasil kerja mereka, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan peluang ekonomi yang merata. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan ekonomi pedesaan harus menjadi prioritas dalam pembangunan desa berkaitan langsung dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan daya beli, serta penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

3). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ekonomi pedesaan

Pendapatan ekonomi pedesaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Setiap faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat penghasilan masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan memahami faktor-faktor ini, maka program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran.

a. Akses terhadap sumber daya alam dan lahan produktif

Sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan hasil alam lainnya merupakan kekayaan utama desa. Kemampuan masyarakat desa dalam mengelola lahan pertanian, perkebunan, atau peternakan secara optimal akan berpengaruh besar terhadap pendapatan mereka. Semakin subur dan luas lahan yang dimiliki, serta semakin baik pengelolaannya, maka potensi hasil produksinya pun akan semakin tinggi. Namun, apabila masyarakat tidak memiliki cukup akses terhadap lahan atau kualitas lahan kurang baik, maka pendapatan mereka cenderung rendah.

b. Kualitas dan keterampilan sumber daya manusia

Tingkat Pendidikan dan keterampilan masyarakat desa sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan atau pengetahuan teknis seringkali menjadi hambatan yang meningkatkan hasil usaha. Misalnya, petani yang tidak menguasai teknik pertanian modern akan kesulitan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan Pendidikan kewirausahaan sangat diperlukan.

c. Akses terhadap modal dan pembiayaan

Modal merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Banyak masyarakat desa yang kesulitan memperoleh modal, baik dari Lembaga keuangan formal maupun non-formal. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pembelian alat produksi, bahan baku, atau pengembangan usaha baru. Pemerintah dan Lembaga keuangan harus menyediakan akses permodalan yang mudah dan terjangkau agar masyarakat desa dapat mengembangkan kegiatan ekonomi mereka.

d. Akses terhadap pasar dan jaringan distribusi

Pendapatan masyarakat desa juga sangat bergantung pada kemampuan mereka menjual hasil produksi dengan harga yang menguntungkan, namun dalam banyak kasus, masyarakat desa kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan informasi, transportasi, dan jaringan. Akibatnya, mereka hanya menjual produk ke tengkulak dengan harga rendah. Solusi dari masalah ini adalah memperkuat koperasi, memperluas jaringan distribusi, dan memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce agar produk desa bisa dijual langsung ke konsumen.

e. Infrastruktur dan sarana penunjang ekonomi

Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan jaringan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di desa. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi barang, mempermudah mobilitas tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi produksi. Sebaliknya, infrastruktur yang buruk akan menyebabkan biaya produksi tinggi, keterlambatan distribusi, dan kerusakan barang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di desa merupakan investasi jangka Panjang untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

f. Peran pemerintah dan kebijakan pembangunan desa

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Melalui program seperti dana desa, pelatihan UMKM, bantuan alat pertanian, dan penyuluhan, pemerintah dapat membantu memperkuat sektor ekonomi desa. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro dan pengembangan potensi lokal akan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

g. Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Kemajuan teknologi dan inovasi memberikan peluang besar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Penggunaan alat pertanian modern, aplikasi digital untuk pemasaran, dan teknologi pengolahan hasil pertanian akan membantu meningkatkan nilai tambah produk. Namun, hal ini memerlukan pendampingan dan pelatihan agar teknologi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2.1.5 Ciri-Ciri Ekonomi Pedesaan

ekonomi pedesaan merujuk pada system ekonomi yang berkembang di wilayah desa, yang umumnya memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan ekonomi perkotaan.

a. Bergantung Pada Sektor Pertanian

ketergantungan yang tinggi terhadap sekto pertanian dan sumber daya alam. Sebagaimana di jelaskan oleh rosyid dan rudiartoo (2014), masyarakat pedesaan cenderung mengandalkan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian, dengan sitem pertanian yang bersifat subsisten dan tradisional. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan musim.

b. Keterbatasan Modal Dan Akses Infrastruktur

Selain itu, ekonomi pedesaan juga ditandai dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan teknologi. Menurut nisa, rifai, dan kurnia (2024), indeks ketahan ekonomi (ike) desa di provindi riau menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan indeks ketahan social dan lingkungan, yang mencerminkan rendahnya akses masyarakat desa terhadap fasilitas ekonomi dan teknologi. Keterbatasan ini menghambat diversifikasi ekonomi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

c. Kuatnya Nilai Gotong Royong

kuatnya ikatan social dan budaya dalam kegiatan ekonomi. Husein (2019) mengatakan bahwa masyarakat desa memiliki budaya gotong royong yang kuat, yang tercermin dalam system kerja Bersama seperti “*sambatan*” atau “*rawang*”.

2.1.6 Definisi Umkm

Umkm merupakan sector usaha yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Pengertian umkm secara yuridis di jelaskan dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut Undang-Undang No. 20 pasal 1 tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang dimiliki perorangan atau individu dalam bentuk usaha perorangan yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dari umkm yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundangan ini.

Dalam era globalisasi, yang utama adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas tersebut menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah termasuk yang berskala mikro, serta koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, posisi ini menempatkan sektor tersebut sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam mewujudkan pengembangan nasional, usaha kecil perlu dibangun menjadi usaha menengah yang makin efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan diharapkan semakin mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa sebagai komponen, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam pasal 35 peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 disebutkan bahwa kriteria umkm dapat di bedakan menjadi dua kategori, yakni untuk usaha yang didirikan setelah berlakunya pp no.7 tahun 2021 dan usaha yang telah ada sebelumnya.

Adapun kriteria umkm berdasarkan modal usaha (untuk usaha baru) adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha dengan modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil adalah usaha dengan modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000.00 sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00.
3. Usaha menengah adalah usaha dengan modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000.00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00

Sementara itu, untuk usaha yang telah ada sebelum berlakunya pp no.7 tahun 2021, kriteria umkm ditentukan berdasarkan penjualan tahunan, yaitu:

1. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
2. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp. 2.000.000.000.00 sampai dengan paling banyak rp. 15.000.000.000.00.
3. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp. 15.000.000.000.00 sampai dengan paling banyak rp. 50.000.000.000.00.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang dalam skala modal kecil, rumahan, dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan ataupun cabang dari sebuah perusahaan besar. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri. Usaha menengah dapat

dilakukan atau dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari suatu perusahaan tetapi usaha yang berdiri sendiri atau tunggal. Usaha besar mempunyai penjualan dan permodalan yang lebih besar dari pada usaha menengah ataupun usaha kecil. Usaha besar memiliki beberapa anak perusahaan.

Dilihat kondisi perekonomian di Indonesia masih tertinggal jika di bandingkan dengan negara-negara lainnya, bahkan Indonesia masih di sebut dengan negara berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut maka Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

UMKM juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. UMKM membantu mempertahankan budaya tradisi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan pentingnya berwirausaha. Dalam konteks strategi UMKM juga merupakan penggerak perekonomian dan berpotensi meningkatkan ekspor. UMKM harus dikembangkan dan perlu dukungan dari pemerintah melalui kebijakan pemerintah, pelatihan dan akses pembiayaan untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa penting umkm menurut bank Indonesia antara lain :

- 1) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam sector ekonomi.
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja.
- 3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Melihat peranan UMKM pada perekonomian, UMKM seharusnya mendapatkan perhatian besar, khususnya Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM. Harefa (2008) mengatakan bahwa regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau sekelompok masyarakat. Maka dari itu pemerintah sangat penting peranannya dalam memberdayakan UMKM.

Tantangan utama UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena riwayat kredit yang tidak memadai. Tentunya hal ini membatasi kemampuan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan, meningkatkan produksi usaha. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, karena pelaku UMKM akan kesulitan bersaing, selain itu kemampuan manajemen dan keterampilan sdm juga akan menjadi hambatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi dan kualitas produk. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan dari pemerintah, seperti pelatihan, pembiayaan, dan infrastruktur yang memadai.

2.2 KAJIAN EMPIRIS

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari kajian yang penulis temui belum banyak kajian terkait “peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan UMKM”.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang akan penulis kaji meliputi :

Tabel 2.2.1

Penelitian Terdahulu

1. Nama peneliti dan tahun penelitian	Muhammad Salahuddin, sulistiawati, sri nurhidayati (2024)
Judul penelitian	peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada usaha mikro kecil dan menengah di desa kerato kecamatan unter iwes kabupaten sumbawa
Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
Hasi penelitian	<p>hasil wawancara yang diperoleh menunjukan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh umkm di desa kerato kecamatan unter iwes antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pada aspek permodalan, sebagian umkm masih menggunakan modal sendiri dan tidak menggunakan akses kredit karena kekhawatiran dalam hal pelunasan disamping sebagian besar tidak memiliki jaminan yang memadai.2) Pada aspek produksi, sebagian besar umkm masih menggunakan peralatan produksi yang sederhana, meskipun hal tersebut memberi keuntungan dalam hal biaya prosuksi yang terjangkau, namun peralatan yang masih tradisional, menyebabkan produksi kurang

	<p>efisien, khususnya apabila terdapat pesanan produksi dalam jumlah besar.</p> <p>3) Pada aspek teknologi, sebagian besar umkm belum terkomputerisasi dalam kegiatan operasionalnya, seperti menerapkan pemasaran online.</p> <p>4) Pada aspek pemasaran, sebagian umkm belum mematenkan produk, belum terdapatn diferensiasi produk dan belum memiliki kerjasama dengan perusahaan besar terkait baahan baku maupun penjualan produk.</p> <p>5) Pada aspek sumber daya manusia, sebagian besar umkm belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang ditandai dengan belum dipisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan.</p> <p>6) Pada aspek sosial ekonomi, sebagian besar UMKM kurang siap dengan perubahan kondisi ekonomi seperti ketidakstabilan politik dan bebas dan kondisi pandemic covid-19.</p> <p>7) Pada aspek kelembagaan, belum adanya Lembaga yang mengelola keberadaan UMKM di desa kerato, penelitian di lakukan dengan mewawancara langsung.</p>
--	---

	Pemerintah desa kerato menjalankan perannya dengan kurang baik, hal ini dapat dilihat melalui pelaksana program yang baru akan di laksanakan.
2. Nama peneliti dan tahun penelitian	Yuni guntari, dini yulian, rindu garvera (2024)
judul	peran pemerintah desa dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di desa sukajadi kecamatan sadananya kabupaten ciamis
Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
Hasil	<p>Berdasarkan hasil peneliatian hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pemerintah desa dalam upaya pengembangan UMKM di desa sukajadi kecamatan sedanannya kabupaten ciamis belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa belum melakukan perannya dengan sepenuhnya salah satunya tidak ada fasilitis dalam hal peralatan dan permodalan, belum ada kebijakan-kebijakan yang mengurus UMKM yang ada di desa sukajadi.</p> <p>Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan UMKM belum berjalan secara optimal, namun terdapat langkah-langkah atau upaya yang telah diambil oleh pemerintah desa menunjukan adanya upaya nyata untuk mendukung</p>

	pengembangan umkm di tingkat lokal yaitu mengadakan pelatihan, bimbingan secara rutin tentang pemasaran digital, penggunaan social media, dan platform e-commerce
3. Nama peneliti dan tahun penelitian	Giovanni malamta purba (2023)
Judul	peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di kota semarang (studi kasus : kampung batik kota semarang)
Metode	Deskriptif kualitatif
Hasil	<p>Dari hasil yang ditemukan di lapangan menunjukan bahwa baik dari pemerintah maupun pelaku umkm industri batik di kampung batik bubakan semarang setuju dan sepemikiran bahwa peran pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM industri batik di kampung batik semarang bubakan agar dalam pelaksanaan pemberdayaanya dapat dilakukan secara runtun dan terintegrasi.</p> <p>Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memang sudah dilakukan , akan tetapi peran yang sudah dilakukan kurang optimal karena masih adanya para pelaku umkm terkait ketidaktahuan akan peran yang sudaah</p>

	<p>dilakukaaoleh pemrintah itu sendiridan juga masalah-masalah yang sudah dijelaskan, hal ini dikarenakan kurangnnya komunikasi yang dilakukannoleh pemerintah sendiri sebagai pihak berwenang serta ditambah kurangnya minat dari pelaku UMKM untuk mencari tahu akan peran atau program yang sudah dilaksanakan pemerintah dan kurangnya minat menerapkan pelatihan yang sudah diberikan, sehinga peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM kampung batik bubakian semarang masih belum efektif dan efisien.</p>
4. Nama peneliti dan tahun pnelitian	Azizah rusda, andi herman jaya, harnida w.adda (2023)
judul	peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di desa sibalaya selatan
Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
hasil	<p>Berdasarkan hasil mengenai peran pemerintah di dapatkan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di desa sibalaya yakni sebagai fasilitator. Pemerintah memiliki dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang di miliki oleh UMKM.</p> <p>Dalam pengembangan UMKM perlu adanya perann dari pihak internal yaitu pelaku usaha dan pihak</p>

	eksternal pemerintah desa, pengembangan umkm desa sibalaya selatan melalui pemberian akses permodalan dengan mengoptimalkan peran koperasi simpan pinjam namun masih terkendala mengenai transparansi data, dan lemahnya pembinaan dari pemerintah.
5. Nama peneliti dan tahun penelitian	Bellani syahputri siregar, tomi jaffisa (2020)
Judul	peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di desa laut dendang
Metode penelitian	Deskriptif kualitatif
Hasil penelitian	Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di desa laut dendang kecamatan percut sei tuan, bahwa program yang meningkatkan perekonomian keluarga yaitu bahwa program UMKM dapat memberdayakan potenssi yang ada pada masyarakat khususnya ibu-ibu dan pengangguran sehingga masyarakat menjadi kreatif dan dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di desa laut dendang.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasa-dasar pemikiran untuk memperkuat sub focus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, di butuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks penelitian ini, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian .

Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di daapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah permohonan. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam dalam kerangka konseptual sesuai denan penelitian yang akan diteliti yaitu “peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan UMKM”.

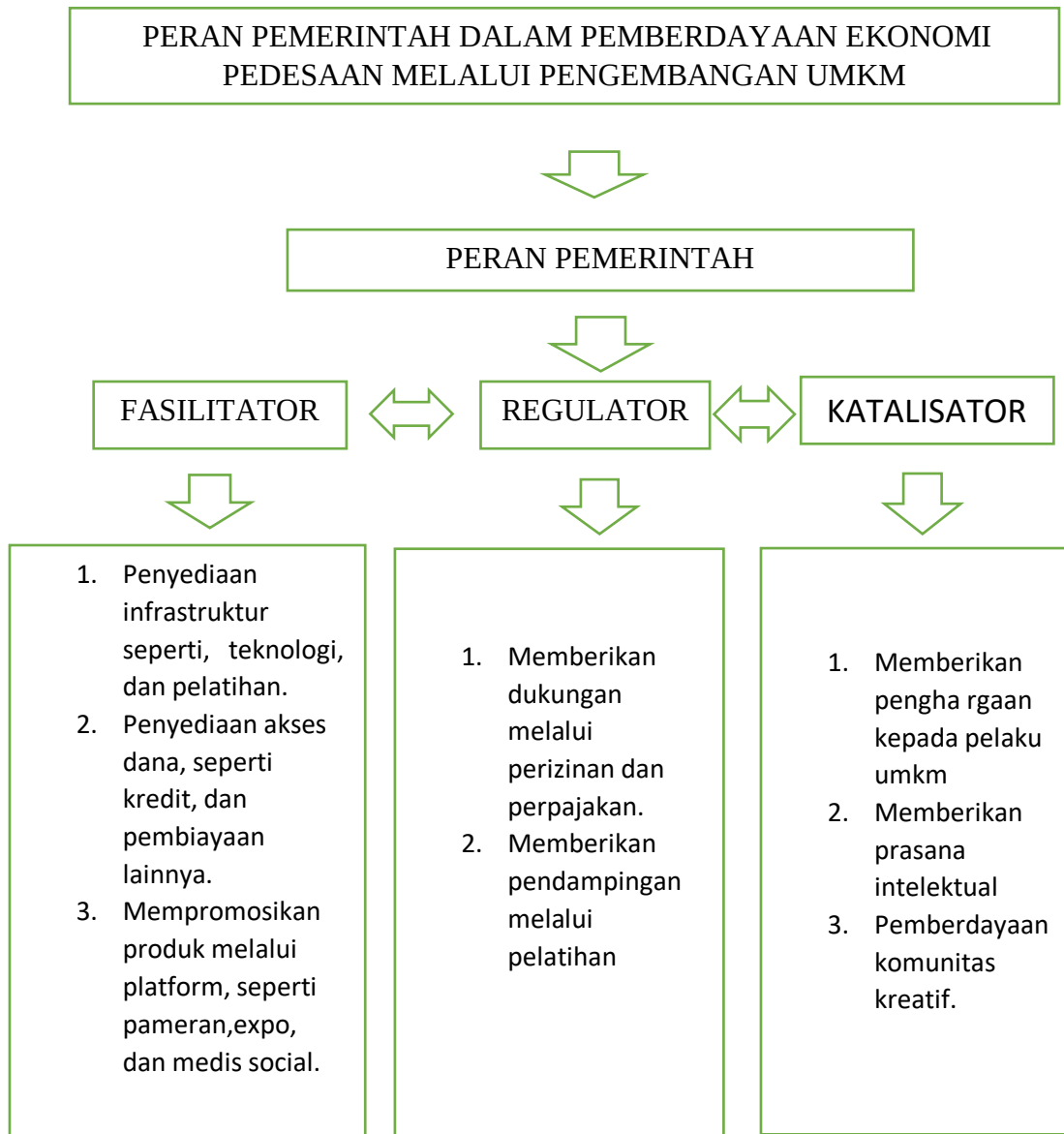
Di antaranya akan dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan ekonomi pedesaan : meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembanan ekonomi lokal.
- b) Pengembangan UMKM : meningkagkan kemampuan dan kesempatan usaha mikro, kecil dan menengah.

- c) Peran pemerintah : fasilitator, regulator, dan pendukung pengembangan umkm.

Gambar 2.3.1

Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskripsi kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Desain deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat. Serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, dimana dalam penelitian ini melihat karakteristik masalah yang ada kaitanya dengan latar belakang, kondisi saat ini yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, baik individu ataupun kelompok/komunitas tertentu yang terkait dengan penelitian. Dalam pendekatan ini peneliti mengkaji secara lebih mendalam tentang situasi dan interaksi.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh melalui observasi langsung pada pelaku UMKM di desa tengkapak, serta wawancara dengan pemerintahan desa yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi desa, untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah yang didapat peneliti secara langsung, data primer di peroleh secara langsung melalui wawancara, dikumentasi terhadap pelaku usaha kerajinan tangan. Cara ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan memberikan temuan yaitu seperti hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usahah selama ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa dan para pelaku usaha 3 orang.

3.2.2 Data Sekunder

data sekunder adalah sumber data yang tidak didapat secara langsung Oleh peneliti untuk mendukung dari data primer, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal terkait penelitian, dan bahan-bahan lainnya.

Menuurut sugiyona (2018), data sekunder dapat berasal dari instansi pemerintah, lelabag swasta, perpustakaan, media masa, maupun jurnal ilmiah. Misalnya, data dari badan pusat statistic (bps), Kementerian, atau laporan tahunan perusahaan dapat digunakan sebagai data sekunder untuk analisis labih lanjut. Meskipun tidak diperoleh secara langsung, data sekunder tetap harus relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar hasil peneletian menjadi valid.

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Tengkapak, Dengan pertimbangan dan memperhatikan berbagai alasan. Penentuan lokasi penelitian dianggap sangat penting karena berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan focus yang ditentukan. Desa tengkapak merupakan salah satu desa yang memiliki umkm yang perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan

pembangunan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan focus penelitian yang telah ditentukan.

Desa Tengkapak juga memiliki beberapa jenis UMKM yang dapat di tingkatkan agar mampu bersaing dengan daerah lain. Melalui cara pengembangan potensi lokal yang bergerak dalam bidang UMKM, ada beberapa yang menjadi unggulan desa tengkapak adalah kerajinan tangan, berupa sa'ung, gai (anjat), pakaian adat, tampi, keranjang dsb.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, percakapan tatap muka yang dilakukan untuk mendapatkan informasi disebut wawancara. Wawancara akan ditanyakan langsung kepada objek yang diteliti dan telah dirancang, dalam hal ini bertujuan menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan UMKM.

b. Survei/kuesioner

Survei atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi tertentu.

Teknik pengumpulan data survei/kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari survei adalah

memperoleh data yang representative dari suatu populasi melalui sampel yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Sugiono 2014, Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian untuk melengkapi dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui laporan dinas umkm dan jurnal terkait penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tujuan dari analisis data penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah penelitian. Miles dan Huberman dalam sugiyono (2008), Agar mudah dipahami. Maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive*, dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data pada penelitian adalah proses mengumpulkan informasi atau keterangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sudah diajukan. Peneliti melakukan penelitian dengan hal-hal yang relevan berkaitan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan UMKM yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengamatan langsung.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dalam penelitian adalah proses dimana peneliti mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan dan mempersempit data yang sudah dikumpulkan

dengan menghilangkan informasi yang kurang relevan guna memudahkan analisis data serta mengidentifikasi temuan penting.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data penelitian merupakan proses mengkomunikasikan hasil penelitian pada pembaca menggunakan cara yang jelas. Terstruktur serta informatif. Dengan demikian peneliti akan memahami sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya.

4. Menarik kesimpulan (*conclusions*)

Menarik kesimpulan adalah tahapan penting dalam proses penelitian dimana peneliti menggabungkan hasil analisis data dengan tujuan penelitian untuk merumuskan jawaban atau kesimpulan yang berkaitan menggunakan pertanyaan penelitian yang diajukan

3.6 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi data terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk memeriksa validitas data dalam penelitian kualitatif dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi dengan melihatnya dari berbagai perspektif.

2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk memperoleh data dengan hal yang berhubungan oleh perilaku manusia, dengan mendapatkan data melalui pengamatan di desa tengkapak kecamatan tanjung selor terkait pengembangan UMKM.

Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi informasi yang diperoleh oleh responden atau objek penelitian pada waktu yang berlainan, baik pagi, siang, sore maupun dalam rentang hari atau bulan tertentu. Teknik ini sangat berguna dalam memahami perubahan pandangan, sikap, atau perilaku yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu.

3. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah untuk mengecek kebenaran data dengan temuan penelitian. Membandingkan dari hasil wawancara melalui informasi. Tujuan dari triangulasi metode adalah untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan hasil dari beberapa pendekatan, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Pada tahun 1975 ada sebagian kecil masyarakat desa Jelarai Selor yang ingin meningkatkan perekonomian mereka melalui bercocok tanam dengan pola tanaman jangka Panjang, yaitu berkebun. Kebun yang dimaksud adalah :

- Kebun kelapa ditambah dengan jambu mente
- Kebun cengkeh ditambah dengan mente

Yang dilaksanakan oleh kelompok tani dibawah pembinaan dinas perkebunan kabupaten bulungan. Sebagai pembina penyuluh lapangan (ppl) adalah bapak Hamjah, atas saran dan petunjuk beliau, dibentuklah dua kelompok tani kebun (hkti) dan kemudian disusun pengurus dan anggota kelompok.

Kebun kelapa berlokasi di dataran kanan dan kiri sungai mangka buah, pada tahun 1975 dimulai penanaman. Kemudian pada tahun 1977-1978 penanaman tahun kedua, anggota dan pengurus terdaftar sebanyak kurang lebih 25 orang dan sebagai ketua kelompok adalah bapak Udu Suwau.

Pada tahun 1977 seiring dengan situasi dan kondisi, anggota beserta keluarga kelompok tani yang masih terpisah-pisah tempat tinggal mereka dengan pondok yang terbuat dari kayu bulat dan atapnya dari daun nipah. Dengan keadaan demikian, untuk berkomunikasi sangat sulit. Untuk mengatasi hal-hal demikian kepala keluarga yang juga terdaftar sebagai pengurus dan anggota kelompok bersepakat satu hati seiaa sekata memusulkan untuk mendirikan sebuah pemukiman di dataran tengkapak pada tahun 1979, kemudian pemukiman tersebut diusulkan ke pemerintah desa Jelarai Selor untuk dijadikan sebuah rukun tetangga (RT) atas persetujuan kepala desa (bapak Anget

labung) maka disahkan sebagai Rt. 6 tengkapak dengan alamat jalan pantai indah dan sebagai ketua Rt adalah bapak udu suwau.

Tahun 1980, di bawah pimpinan bapak udu suwau mulai membuat rencana dan menyusun program pembangunan untuk masa depan tengkapak, dua tahun kemudian (1982), rombongan ding udu (alm) pindah dari long sungai apau kayan ke long peso pada tahun 1979, dan pada tahun 1982 pindah dari long peso akibat kemarau Panjang untuk dating membuat sawah pasang surut di tengkapak kurang lebih 32 kk.

4.1.2 Kondisi Desa

Desa tengkapak salah satu desa di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan, Kalimantan utara, dengan luas wilayah sekitar 12.700 Ha. Dengan jumlah penduduk 1.055 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 301 pertahun 2025. desa tengkapak berbatasan dengan :

- Utara : kelurahan tanjung selor timur
- Timur : desa bumi rahuyu dan apung
- Selatan dan barat : desa jelarai selor

4.1.3 Demografi Desa

Jumlah penduduk desa tengkapak pada tahun 2021 sebanyak 1.055 jiwa terdiri dari laki-laki 564 jiwa dan perempuan 491 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 301

a) Jumlah penduduk menurut golongan umur

Tabel 4.1
Golongan Umur

no	Golongan umur	jumlah
1.	0 bln -15 thn	252 jiwa
2.	16 thn – 65 thn	732 jiwa

3.	66 thn keatas	71 jiwa
jumlah		1.055 jiwa

b) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 4.3
Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Tni/polri	7 orang
2.	Pengawai negeri sipil	17 orang
3.	karyawan	52 orang
4.	petani	201 orang
5.	nelayan	22 orang
6.	wiraswasta	26 orang

Desa tengkapak memiliki potensi ekonomi lokal cukup besar, khususnya di sector UMKM . mata pencaharian utama masyarakat adalah Bertani, berternak, berdagang dalam skala kecil, serta nelayan. Jumlah pelaku umkm yang terdaftar di desa tengkpk hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 9 umkm, dengan jenis usaha yang beragam mulai dari industri makanan olahan, kerajinan tangan serta jasa, namun dari beberapa umkm tersebut hanya beberapa yang masih aktif menjalankan usahanya.

4.2 PERAN PEMERINTAH DESA TENGGAPAK DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) sebagai fasilitator yaitu Pemerintah desa bekerja dengan dinas terkait salah

satunya bestari fest dan telah menyelenggarakan beberapa program pelatihan kewirausahaan (work shop), pemasaran digital dan serta mengadakan festival budaya dan UMKM. Dinas terkait dan pemerintah desa turut dilibatkan untuk memberikan materi yang kontekstual dengan keadaan desa. Dari kegiatan tersebut banyak pelaku umkm ikut berpartisipasi guna memperkenalkan produk-produk yang telah di buat, serta banyak instansi terkait dan masyarakat yang ikut untuk memeriahkan acara.

Wawancara peneliti dengan ibu imut kiring : *“saya mengikuti pelatihan pengemasan produk dan pemasaran online dari kegiatan yang di adakan oleh desa, dan itu sangat membantu saya untuk mengembangkan produk-produk saya.”*

Hasil dari wawancara dengan salah satu warga Desa TSengkapak, mengatakan cukup memuaskan dengan di adakannya kegiatan festival budaya dan umkm ini dapat memperkenalkan produk-produk usahanya dan dapat meningkatkan penjualan usahanya tersebut.

Wawancara dengan nenek rut tuai *“Tidak pernah, saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, mau itu bantuan dana atau pelatihan kami tidak pernah dapat, pernah mereka merencanakan untuk mengadakan pelatihan tapi sampai sekarang tidak pernah di laksanakan.”*

Wawancara dengan ibu sisilia *“Saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa atau kabupaten. Awal usaha saya buka saya di berikan bantuan dana dari KODIM sebesar rp.1.000.000 .kalau dari pemerintah desa atau kabupaten tidak pernah.”*

Wawancara dengan ibu miana padan *“Ya saya pernah dapat bantuan dari desa tapi berupa pelatihan saja, itupun waktu saya memulai usaha saya ini. Saya belum begitu diperhatikan oleh pemerintah , tapi lama-lama saya mulai dilibatkan*

oleh desa untuk mengikuti pamaren dan grup sanggar tari saya juga sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu”.

Wawancara dengan pemerintah desa tengkapak “Bisa di katakana kami sudah melakukan tugas kami sebagai fasilitator namun belum begitu efektif. Karena kami dari pemerintah desa hanya memfasilitasi pelaku umkm melalui pelatihan tidak ada pendampingan secara khusus. Untuk bantuan dalam bentuk pembiayaan kami dari pemerintah desa tidak memiliki anggaran ke sana, namun kami melakukan pengadaan proposal ke setiap perusahaan yang berada dekat dengan desa tengkapak.”

Sebagai fasilitator pemerintah desa tengkapak belum optimal dalam memfasilitasi pelaku umkm yaitu dalam pendampingan pelatihan dan pendampingan seperti packaging serta memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan-pembinaan dan pendanaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa selama ini pendanaan, promosi produk hasil umkm belum maksimal dan bentuk dukungan kelembagaan. Kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan umkm belum merata dan belum semua pelaku usaha terdampak dengan kebijakan tersebut, sehingga menghambat dalam hal pemberdayaan umkm.

Menurut fitriani dan dewi (2021) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator sangat krusial dalam menghubungkan pelaku umkm dengan sumber daya dan peluang, usaha, terutama dalam bentuk pelatihan pemasara, dan pembiayaan. Ketika peran ini tidak dijalankan dengan baik, maka usaha kecil sulit berkembang dan daya saingnya rendah.

Adapun hal yang membuat pemerintah desa belum optimal dalam mendampingi usaha masyarakat kecil, dikarenakan pemerintah desa lebih focus dan mengarah ke pembangunan infrastruktur desa, sehingga kurangnya dukungan secara khusus bagi pelaku umkm yang ada. Menurut Suharto (2020), menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berhasil jika ada dukungan aktif dari pemerintah melalui pelatihan, fasilitasi, akses terhadap sumber daya, dan kebijakan yang inklusif.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan umkm di desa tengkapak, peran pemerintah desa sebagai regulator berarti pemerintah desa bertugas membuat aturan dan kebijakan lokal yang mengatur kegiatan usaha masyarakat, serta memastikan aturan tersebut dijalankan dengan baik. namun berdasarkan hasil penelitian di desa tengkapak.

Peran sebagai regulator ini belum berjalan maksimal. Banyak pelaku umk yang belum memiliki surat izin usaha, selain itu belum ada regulasi atau peraturan desa khusus yang secara tegas mengatur tentang kegiatan umkm.

Wawancara dengan nenek rut tuai *“Belum, saya belum memiliki surat izin usaha. Saya tidak tahu mau minta surat izin sama siapa dan pemerintah desa pun sampai sekarang belum buat izin usaha untuk kami.”*

Wawancara dengan ibu sisilia *“Belum, saya belum memiliki surat izin usaha. Saya sempat dulu ditawarkan untuk dibuatkan surat izin usaha cuman sampai sekarang saya belum ada dapat surat izin usaha.”*

Wawancara dengan ibu miana padan *“Ya saya sudah memiliki surat izin usaha dari pemerintah kabupaten.”*

Wawancara dengan pemerintah desa *“Untuk sekaarang kami dari pemerinah desa belum memiliki program khusus untuk mendukung legalisasi usaha masyarakat, selama ini warga yang ingin memiliki surat izin usaha biasanya mereka melakukannya sendiri ke kecamatan atau dinas terkait. Namun kedepannya kami dari pemerintah desa akan siap membantu masyarakat dan memfasilitasi mereka untuk membuat surat izin usaha.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa dan pelaku umkm, pemerintah desa tengkapak belum memiliki program atau kebijakan khusus yang secara langsung membantu masyrkata dalam proses legalisasi atau pembuatan surat izin usaha. Jadi, jika ada warga atau pelaku umkm yang ingin mengurus surat izin usaha, mereka harus mengurusnya sendiri ke kantor kecamatan atau dinas yang berwenang.

Menurut dermawan (2021), legalitas usaha sangat penting karena menjadi syarat utama bagi pelaku umk untuk mendapatkan alses pembinaan. Permodalan, serta program-program pemerintah lainnya. Tanpa adanya legalitas, umkm akan terus berada pada posisi yang rentan dan sulit berkembang.

Dalam hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih melakukan semuanya secara mandiri tanpa bantuan dari pihak desa. namun, dalam pernyataan tersebut pihak desa juga menjelaskan bahwa ke depannya pemerintah desa berencana untuk lebih aktif dan pemerintah desa juga menyatakan akan siap membantu dan memfassilitasi warga atau pelaku umkm untuk mengurus surat izin usaha agar prosesnya lebih mudah.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah desa berperan penting dalam mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa.

Pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga penggerak dan pendorong perubahan, khususnya dalam mengembangkan potensi masyarakat seperti palaku umkm.

Peran pemerintah desa sebagai katalisator adlah dengan memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat untuk berani memulai usaha sendiri, dan menjembatani pelaku umkm dengan pihak luar, seperti dinas koperasi, lembaga keuangan, dan pelatihan dari pemerintah daerah.

Wawancara dengan nenek rut tuai *“Saya belum merasa cukup sama program pemerintah desa, bagaiman mana mau memberdayakan pengembangan umkm sedangkan usaha kecil yang seperti kami saja tidak diperhatikan.”*

Wawancara dengan ibu sisilia *“Kalau saya masih belum cukup karena masih banyak dari kami yang punya usaha ni tidak dijangkau, pemerintah desa hanya dating mendata-data kami aja tapi tidak mendapat apa-apa.”*

Wawancara dengan ibu miana padan *“Kalau boleh jujur, saya merasa pemerintah desa ni belum cukup hadir bagi masyarakat. Karena saya bangun usaha saya sendiri.”*

Wawancara dengan pemerintah desa *“Pemerintah desa sendiri selalu berusaha supaya masyrakat bisa ikut aktif dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam membangun usaha sendiri atau usaha mandiri. Kami juga sering mengajak masyarakat lewat musyawarah dan pertemuan desa untuk membicaara peluang usaha apa saja yang bisa dikembangkan, misalnya seperti usaha ternak ayam, ikan, dan sayur-sayuran, namun yang datang hanya sebagian masyarakat saja bisa dihitung.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintah desa dan pelaku umkm, diketahui bahwa pemerintah desa memiliki peran aktif dalam mendorong masyarakat dalam mengikuti kegiatan ekonomi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadakan musyawarah dan pertemuan desa, yang bertujuan untuk membahas potensi usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Menurut sutoro eko (2020), pemerintah desa menjadi motor penggerak perubahan social dan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan yang partisipasi dan responsive terhadap kebutuhan warga. Artinya, pemerintah desa harus proaktif dan mampu memici semangat kemandirian masyarakatnya.

4.3 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMERINTAH DESA

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah desa tengkapak memiliki peran penting sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, namun dalam pelaksanaannya terdapat factor yang menjadi pendukung dan penghambat.

Desa tengkapak memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang sangat besar. Di sector pertanian, yang menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan, buah-buahan, dan sayuran lokal yang belum sepenuhnya dikembangkan menjadi produk olahan.

Selain itu budaya lokal Dayak yang masih kental juga menjadi potenssi besar, terutama dalam bidang kerajinan tangan seperti anyaman, ukiran kayu, manik-manik, dan pakaian adat. Potensi ini bisa menjadi landasa kuat bagi pengembangan umkm berbasis lokal. Pemerintah desa mendukung pemanfaatan potensi ini melalui pembentukan kelompok usaha kecil, pelatihan pengolahan hasil tani, dan dukungan moral dalam bentuk prosmosi di acara desa.

Pemerintah desa pernah mengadakan kegiatan festival budaya dan umkm dan di gandeng dengan acara pesta panen di desa tengkapak, yang melibatkan tamu dari luar dan masyarakat desa tengkapak. Di mana kegiatan tersebut melibatkan pelaku-pelaku umkm untuk memperkenalkan produk-produk mereka masing yang berupa makanan olahan dan berbagai macam kerajinan tangan.

Wawancara dengan pemerintah desa *“Tantangan yang kami hadapi cukup banyak, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan bagi kami pemerintahan desa, kami dari pemerintah desa sangat ingin membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka tapi dana yang tidak mencukupi dan bahkan kami harus memasukan proposal terlebih dahulu.”*

Wawancara dengan pemerintah desa *“Tantangan kami pemerintah desa hadapai sebagai regulator yaitu menyusun aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa, kadang aturan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagian dari masyarakat sulit untuk menerimanya, karna ada yang belum paham dengan tujuannya. Ada juga pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya tapi belum memiliki surat izin usaha atau tempat yang sesuai.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa tengkapak, ditemukan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa sebagai regulator adalah menyusun aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kadang-kadang aturan yang dibuat tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat karena adanya perbedaan pemahaman dan kurangnya sosialisasi. Selain itu tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa tengkapak adalah keterbatasan anggaran. Pemerintah desa menyadari bahwa mereka ingin mendukung masyarakat dalam membangun usaha, namun keterbatasan dana menjadi penghambat utama.

Salah satu alasan pemerintah desa tidak memfokuskan anggaran khusus untuk plekau UMKM adalah dana desa di pergunakan dan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti memperbaiki jalan di setiap RT dan lainnya. Untuk mendapatkan dana atau bantuan dari pihak di atas seperti pemerintahan kabupaten atau instansi lainnya, pemerintah desa harus membuat dan mengajukan proposal terlebih dahulu.

4.5 PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari pemerintah desa pelaku umkm di desa tengkapak pertahun 2024 sebanyak 6 pelaku usaha yang masih aktif bergerak di bidang kerajinan tangan, catering, dan produk makanan. Adapaun faslitasi berupa pelatihan dan sebagainya belum merata diberikan dan diikuti oleh pelaku usaha yang ada di desa tengkapak. Pemerintah desa seharusnya melakukan sosialisasi kepada semua pelaku umkm untuk mengikuti pembinaan guna untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pemasaran produk mereka.

Pemerintah desa tengkapak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan umkm sebagai upaaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti hasil pertanian, perikanan, atau keterampilan membuat makanan dan kerajinan. Selain itu, ada upaya untuk menyertakan pelaku umkm dalam kegiatan desa, seperti festival budaya dan umkm, namun dalam pelaksanaannya peran pemerintah desa masih belum berjalan maksimal.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana desa yang tidak secara khusus dialokasikan untuk program umkm, kurangnya pendampingan yang berkenlanjutan, pemerintah desa cenderung masih focus pada pembangnan fisik seperti jalan dan

fasilitasi umum. Padahal, umkm berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat jika dibina dengan serius.

Strategi yang diterapkan pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui umkm sebenarnya udah mulai terlihat, meskipun masih belum menyentuh seluruh aspek yang dibutuhkan pelaku usaha, beberapa strategi yang dilakukan antara lain dengan menghadirkan pelatihan yang bekerja sama dengan dinas koperasi, mengadakan kegiatan pasar desa untuk membantu penjualan produk lokal, serta mengajak pelaku umkm ikut serta dalam kegiatan pelatihan yang diadakan di tingkat kabupaten.

Namun, banyak pelaku umkm yang merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung dari strategi tersebut. Hal ini tidak dilakukan secara rutin dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, tidak semua pelaku umkm memiliki akses informasi yang cukup, sehingga mereka tidak tahu ada program atau bantuan yang tersedia. Belum ada juga sistem pendampingan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi yang ada masih bersifat umum dan belum spesifik menangani permasalahan yang dihadapi umkm desa. Dengan kata lain, strategi yang diterapkan pemerintah desa masih bersifat sementara dan belum cukup efektif dalam memberdayakan pelaku umkm agar bisa berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan umkm di desa tengkapak, terdapat berbagai factor yang memengaruhi keberhasilannya. Di satu sisi ada fakto-faktor yang mendukung, seperti semangat masyarakat yang tinggi untuk berwirausaha dan potensi lokal yang cukup besar.

Banyak warga yang memiliki keterampilan membuat produk makanan, kerajinan tangan, serta memanfaatkan hasil pertanian lokal. Dukungan awal dari pemerintah desa seperti penyediaan tempat berjualan atau promosi melalui kegiatan desa juga cukup membantu.

Namun, disisi lain, masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya kendala utama adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah secara berkelanjutan. Banyak pelaku umkm yang belum memiliki pengetahuan tentang cara mengelola usaha, membuat perizinan, ataupun memasarkan produk mereka secara lebih luas.

Akses terhadap modal usaha juga masih menjadi kendala besar, banyak warga yang memiliki keinginan berusaha tetapi tidak punya cukup dana untuk memulai. Semua hal ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar program pemberdayaan ekonomi melalui umkm bisa berjalan dengan lebih baik

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat desa tengkapak dan beberapa pelaku umkm setempat, dapat disimpulkan bahwa pemerinbtah desa tengkapak telah memiliki peran penting dalam pengembangan umkm sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga sisi utama, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa tengkapak belum aktif dalam mendampingi pelaku umkm dengan memberikan berbagai bentuk dukungan seperti pelatihan usaha, pendampingan administrasi, serta bantuan informasi mengenai program pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah desa belum menyusun kebijakan lokal guna menciptakan iklim usaha yang tertib dan adil. Pemerintah desa belum membantu pelaku umkm dalam pembuatan surat keterangan usaha (SKU), dari hasil penelitianditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya regulasi ini, sehingga sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan agar peraturan yang dibuat benar-benar dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat.

Sebagai katalisator, pemerintah desa belum cukup dalam mendukung atau mendorong masyarakat dalam berusaha, kurang memperhatikan masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus, sehingga banyak pelaku umkm yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah desa.

5.2 SARAN

1. pemerintah desa dan dinas terkait perlu memperluas jangkauan pelatihan, khususnya yang berbasis teknologi digital dan pemasaran online, agar pelaku umkm dapat bersaing secara lebih luas.
2. Pelaku umkm perlu meningkatkan inisiatif dan kemandirian, tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga aktif mencari peluang usaha dan inobasi produk.
3. Pemerintah disarankan untuk menjalin lebih banyak kerja sama dengan sector swasta dan platform digital dalam memasarkan produk umkm secara lebih luas,
4. Pembangunan infrastruktur digital seperti akses internet dan pusat informasi usaha desa sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM kearah digitalisasi.
5. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pemberdayaan UMKM agar dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khairul (2019) “ *strategi pemerintah dalam pengembangan umkm dikabupaten jepara*” universitas diponegoro, hlm 11.
- Ginandjar katarsasmita (1995) “*pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat*”. Bestari, hlm. 29-34.
- Rusda, a., jaya, a,h., & adda, h. w. (2023), *peran pemerintah desa dalam pengembangan umkm di desa sibalaya selatan*. jurnal riset dan inovasi manajemen 1(2) hlm18-25.
- Soimah, nurus; Imelda, dewi, qomariah (2023) *urgensi legalitas usaha bagi UMKM*. jurnal benuanta, vol. 2, no 1, hlm 21-25.
- Soimah, nurus; messi; Imelda, dewi, qomariah (2023) “*strategi Pemerintah provinsi Kalimantan utara terhadap umkm pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19*”. Hlm 122.
- Undang-undang republic Indonesia no 20 tahun 2008, tentang UMKM pasal 1
- Suhardjo,A.J. (2019). *Geografi pedesaan sebuah antologi, Ideas media pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm)di desa laut dendang*, edisi 7 jurnal public reform undhar medan, hlm 8-14.
- Turyani, Siti, marfuah; hartiyah sri (2019) *pengaruh modal sendiri, kredit usaha rakyat (kur), teknologi, lama usaha dan lokasi usaha (studi kasus pada umkm dikabupaten wonosobo)* jurna of economic, business and engineering vol. 1, no. 1, hlm. 181-195.
- Syahputri, bellani,siregar: jaffisa, tomi (2020) *peranana pemerintah dalampemberdayaan mikro kecil dan menengah (umkm) di desa laut dendang, universitas dharmawangsa*. Edisi 7 jurna public reform undhar medan, hlm 8-14.
- Peraturan pemerintah : pp no. 7 tahun 2021 *tentang usaha mikro kecil dan menengah*. Charismanur. Wiltarda, anggraeni; puspita, wulan, ningtiyas; nurdiyah. 2021 *kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan umkm di masa pandemic covid-19 di indoinesia*. JGOP 3 (1), hlm.47-65

- kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. (2020) *permen KUKM Nomor 5 tahun 2020 tentang renstra kementerian koperasi dan ukm tahun 2020-2024*. Peraturan Menteri.
- Kementerian pertanian republic Indonesia. (2020). *Ekonomi pedesaa; tantangan dan peluang pembangunan pertanian di daerah*. Jakarta; kementerian pertanian rfepublik Indonesia.
- Sunyota; usman (2004). *Pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat*. Yogyakarta; pustaaka pelajar.
- Salahuddin, M., sulistiawati, & nurhidayati, s. (2024). *Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada ussaha mikro lkecil dan menengah di desa kerato kecamatan unter iwes kabupaten sumbawa*. Jurna kajian sosiologi dan administrasi public. Hlm.382-385.
- Guntari, y., yuliani, d., & garvera,r. (2024). *Peran pemerintah desa dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di desa sukajadi kecamatan sedanannya kabupaten ciamis*. Demokrasi; jurnal riset ilmu hokum, social dan politik. Hlm 102-113.
- Purba, g.m. (2018). *Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan umkm di kota semarang(studi kasus kampung batik kota semarang)*. Journal of politic and government studies. Hlm 191-200.
- Siregar, b. s., & jafifisa, t. (2020). *Peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa laut dendang*. Public reform, hlm. 8-14.
- Rosyid, m., & rudiarto, i. (2014). *Karakteristek social ekonomi masyarakat petani kecamatan bandar dalam system livelihood pedesaan*. Geoplanning; journal of geomatics and planning, hlm. 74-84.
- Nisa, n. a., rifai, a., & kurnia, d. (2024). *Analisis karakteristik ekonnomi desa di wilayah daratan provinsi riau menurut indeks desa membangun (idm) tahun 2022*. Mimbara agribisnis; jurnal pemikiran masyarakat ilmiah berwawasan agribisnis, hlm. 3686-3698.
- Husein (2019) *budaya dan karakteristik masyarakat pedesaan*. Jurnal ilmiah administrasi dan kebijakan public, hlm 197.

Mankiw, n.g. (2012) *principles of economics*, south-western cengage learning. Hlm. 28

Sukirno, s. (2006). *Makro ekonomi teori pengantar*, edisi ketiga. Jakarta; rajawali pers. Hlm.37

sigiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : alfabeta.

Kementrian coordinator bidang perekonomian republic Indonesia (2024). *Laporan realisasi kredit usaha rakyat (KUR)*.

Kementrian komunikasi dan informatika republic indonesia (2023). *Transformasi digital umkm dalam program garuda BBI*.

Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. (2021). *Permendes PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022*. Jakarta: kemendes PDTT.

Suharto. E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat; teori dan praktik*. Bandung: refika aditama.

Fitriani. R., & dewi, A. Y. (2021). *Peran pemerintah dalam pemberdayaan umkm di wilayah perdesaan*. Jurnal ilmu social dan politik.8(2), hlm 145-158.

Badan pusat statistic (2023). *Statistik ekonomi desa 2023*. Jakarta : BPS.

Mulyadi, D., & nurlela, s. (2021). *Ekonomi pembangunan pedesaan*. Yogyakarta: deepublish.

Siagian, S. P. (2019). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: bumi aksara.

L
A
M
P
I
R
A

Lampiran 1

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

Hasil Wawancara

Pemerintah Desa Tengkapak

Nama : Simej Kajan

Instansi : Pemdes Tengkapak

Jabatan : Bendahara

INDIKATOR	DIMENSI	URAIAN
Pengembangan umkm	Apa saja program pemerintah desa yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan umkm di desa tengkapak ?	Sejauh ini program yang pemerintah desa lakukan untuk pengembangan umkm adalah salah satunya bekerja sama dengan kecamatan dan dinas terkait dalam hal kegiatan pelatihan dan pameran yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu yang lalu.
	Bagaimanan pemerintah desa meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku umkm ?	Dari pemerintah desa sendiri kami tidak ada anggaran dana untuk pelaku umkm sendiri, namun kami melakukan pembuatan proposal dan bekerja sama dengan perusahaan yang berada di desa tengkapak .
	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengembangan umkm ?	Tantangan kami dari pemerintah desa adalah kami belum bisa melakukan

		pembuatan izin usaha bagi pelaku umkm yang ada di desa tengkapak ini, dan juga dalam hal pemasaran secara digital.
Pemberdayaan ekonomi pedesaan	Strategi apa yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi pedesaan ?	Strategi yang kami lakukan adalah melakukan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat kami juga berkolaborasi dengan pihak eksternal agar mendapatkan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut melalui event pameran.
	Apa hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui umkm ?	Kalua hasil yang kami telah capai yaitu kami memperoleh juara 3 pada saat kami mengikuti salah satu kegiatan umkm yang diadalah oleh kabupaten yang dimana masing-masing desa memperkenalkan produk usahanya berupa kerajinan tangan.
fasilitator	Apakah pemerintah desa sudah melakukan tugasnya sebagai fasilitator? Dan apa saja bentuk fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat?	Bisa di katakana kami sudah melakukan tugas kami sebagai fasilitator namun belum begitu efektif. Karena kami dari pemerintah desa hanya memfasilitasi pelaku umkm

		melalui pelatihan tidak ada pendampingan secara khusus.
	Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku umkm dalam bentuk akses pembiayaan ? (dana/pinjaman)	Untuk bantuan dalam bentuk pembiayaan kami dari pemerintah desa tidak memiliki anggaran ke sana, namun kami melakukan pengadaan proposal ke setiap perusahaan yang berada dekat dengan desa tengkapak.
	Apa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi masyarakat?	Tantang yang kami hadapi cukup banyak, salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan bagi kami pemerintahan desa, kami dari pemerintah desa sangat ingin membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka tapi dana yang tidak mencukupi dan bahkan kami harus memasukan proposal terlebih dahulu.
regulator	Apakah pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya sebagai regulator? Dan apa saja regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat?	Kami dari pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong masyarakat agar mau terlibat dalam usaha mandiri. Kami juga

		membentuk kelompok usaha Bersama seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu pkk.
	Bagaimana pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan instansi terkait dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi?	Selama ini kami dari pemerintah desa sudah berusaha untuk menjalin kerja sama yang baik dengan instansi lain seperti perusahaan yang berada dekat desa tengkapak dan beberapa instansi lainnya, dan kami sendiri pun tidak bisa bekerja sendiri maknnya kami juga butuh kolaborasi dengan beberapa instansi supaya pengaturan dan pengawasan ekonomi di desa tengkapak juga bisa berjalan lancar dan tertib.
	Apakah pemerintah desa memiliki program khusus untuk mendukung legalisasi usaha masyarakat dan apakah ada pendampingan taubantuan langsung dari desa?	Untuk sekaarang kami dari pemerinah desa belum memiliki program khusus untuk mendukung legalisasi usaha masyarakat, selama ini warga yang ingin memiliki surat izin usaha biasanya mereka

		melakukannya sendiri ke kecamatan atau dinas terkait. Namun kedepannya kami dari pemerintah desa akan siap membantu masyarakat dan memfasilitasi mereka untuk membuat surat izin usaha.
	Apa yang menjadi tantangan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sebagainya regulator?	Tantangan kami pemerintah desa hadapai sebagai regulator yaitu menyusun aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa, kadang aturan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagian dari masyarakat sulit untuk menerimanya, karna ada yang belum paham dengan tujuannya. Ada juga pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya tapi belum memiliki surat izin usaha atau tempat yang sesuai.
katalisator	Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah desa untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam kegiatan ekonomi atau usaha mandiri?	Pemerintah desa sendiri selalu berusaha supaya masyarakat bisa ikut aktif dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam membangun usaha sendiri atau usaha mandiri. Kami juga sering mengajak masyarakat lewat

		<p>musyawarah dan pertemuan desa untuk membicarakan peluang usaha apa saja yang bisa dikembangkan, misalnya seperti usaha ternak ayam, ikan, dan sayur-sayuran, namun yang datang hanya sebagian masyarakat saja bisa dihitung .</p>
	<p>Apakah pemerintah desa pernah mengadakan pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat terkhususnya pelaku umkm?</p>	<p>Kami pernah mengadakan pelatihan tapi banyak masyarakat yang tidak menghadiri pelatihan tersebut. Sebenarnya pelatihan ini sangat membantu mereka untuk mengetahui cara mengembangkan usaha mereka .</p>
	<p>Apakah pemerintah desa pernah memfasilitasi kerja sama antar pelaku umkm dengan pihak luar (seperti dinas, Lembaga keuangan, dan pasar)?</p>	<p>Kami belum bekerja sama dengan Lembaga keuangan manapun untuk memfasilitasi pelaku umkm yang ada di tengkapak karena kami hanya menjalankan proposal ke beberapa perusahaan termasuk instansi lainnya.</p>

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

Hasil Wawancara

Pelaku Umkm Desa Tengkapak

Nama : rut tuai
Jenis kelamin : perempuan
Nama usaha : lansia kreatif
Lama usaha : 2 tahun
Jenis produk : kerajinan tangan
Jumlah karyawan : 10 orang

indikator	dimensi	uraian
Latar belakang dan kondisi pelaku umkm	Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu dalam memulai usaha ini?	Sebelum saya membuka usaha ini saya sudah lama membuat beberapa kerajinan tangan seperti saung, belanyat, tampi dan masih banyak lagi. Karena saya sudah tua tidak bisa lagi berladang jadi saya dirumah hanya bisa membuat kerajinan tangan itu. Saya juga mengajak beberapa teman saya yang seusia saya untuk membuat kerajinan tangan kami masing-masing, sehingga kami diperhatikan sama perusahaan BBS dan memberikan kami bantuan berupa dana untuk melanjutkan usaha kami ini.

	Berapa penghasilan penjualan bapak/ibu dalam sebulan?	Kalau untuk penghasilan, penghasilan kami tidak menentu dan tidak besar juga, palingan sekitar Rp.200.000 sampai Rp.500.000 dan itu pun bukan penghasilan peminggu/perbulan.
	Sejauh ini apa yang menjadi tantangan bapak/ibu dalam menjalankan usaha ini?	Tantangan kami pastinya tentang pemasaran produk kami ini, kalau kita lihatkan hamper semua orang berjualan di hp kan, sedangkan kami ini sudah tua tidak tahunmemakai hp yang sekarang banyak orang orang pakai.
Akses terhadap program pemerintah	Apakah bapak/ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa/kabupaten? Dan apa saja bentuk bantuan yang anda terima?	Tidak pernah, saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, mau itu bantuan dana atau pelatihan kami tidak pernah dapat, pernah mereka merencanakan untuk mengadakan pelatihan tapi sampai sekarng tidak pernah di laksanakan.
	Sejauh ini bantuan apa yang paling berdampak bagi usaha bapak/ibu?	Tidak ada bantuan yang berdampak untuk usaha kami, karena kami tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuka apapun. Malahan produk kami yang di gunakan untuk kepentingan pemerintah desa.

	Apakah anda pernah mengikuti program pemerintah seperti pelatihan, bantuan modal, atau pendampingan usaha?	Kalau untuk pelatihan yang kami ikuti paling yang desa bekerja sama dengan bestari fest untuk mengadakan pergelaran seni budaya dan umkm. Kalua untuntuk bantuan modal atau pendampingan usaha kami tidak pernah mengikuti dan mendapatkannya.
Evaluasi program pemerintah	Apa harapan bapak/ibu untuk program pemerintah kedepannya ?	Harapan saya untuk pemerintah desa, coba lebih memperhatikan masyarakatnya baik yang sedang memulai usaha mereka.
	Apakah bapak/ibu membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah? (dalam bentuk apa)	Pastinya kami sangat membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah karena kami sudah tua selain membuat pekerjaan tangan ini tidak ada lagi kerjaan yang bisa kami kerjakan. Bantu kami untuk memasarkan produk kami aja agar kami ada penghasilan.
	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan legalitas usaha/surat izin usaha dari pemerintah desa/kabupaten?	Belum, saya belum memiliki surat izin usaha. Saya tidak tahu mau minta surat izin sama siapa dan pemerintah desa pun sampai sekarang belum buat izin usaha untuk kami.
	Apakah bapak/ibu sudah merasa bahwa pemerintah sudah cukup	Saya belum merapa cukup sama program pemerintah desa, bagaiman mana mau

	hadir dalam pemberdayaan umkm di desa tengkapak?	memberdayakan pengembangan umkm sedangkan usaha kecil yang seperti kami saja tidak diperhatikan.
saran	Apa saran bapak/ibu kepada pemerintah desa untuk lebih mengembangkan sector umkm di desa tengkapak?	Saran kami, tolong perhatikan masyarakat yang memiliki usaha di des ani, apa lagi yang seperti kami yang sudah tua, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah desa. Buatlah pelatihan khusus untuk kami biar kami juga tahu dan usaha kami ni berkembang.

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

Hasil Wawancara

Pelaku Umkm Desa Tengkapak

Nama : sisilia
Jenis kelamin : perempuan
Nama usaha : tika'cake
Lama usaha : 5 tahun
Jenis produk : olahan makanan
Jumlah karyawan : =

indikator	dimensi	uraian
Latar belakang dan kondisi pelaku umkm	Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu dalam memulai usaha ini?	Yang menjadi motivasi saya untuk memulai usaha ini yakni karena saya ingin membantu ekonomi keluarga saya, ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Saya coba buka usaha kecil-kecilan dari rumah seperti buat kue, ya walaupun tidak begitu banyak tapi lumayan untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk jajan anak-anak saya. Saya hanya ingin memiliki kesibukan yang bermanfaat bukan hanya jadi Ibu rumah tangga saja.

	Berapa penghasilan penjualan bapak/ibu dalam sebulan?	Kalua untuk penghasilan jualan saya tidak begitu banyak tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Mungkin sekitar rp. 1.000.000 – rp. 1.500.000 perbulannya. Kadang tidak sampai juga segitu karena saya sewaktu-waktu juga harus ke kebun .
	Sejauh ini apa yang menjadi tantangan bapak/ibu dalam menjalankan usaha ini?	Tantangan yang saya hadapi tentunya untuk merenovasi tempat jualan saya dan memperbanyak etalase untuk kue-kue yang saya jual. Dan juga saya belum memiliki surat izin usaha.
Akses terhadap program pemerintah	Apakah bapak/ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa/kabupaten? Dan apa saja bentuk bantuan yang anda terima?	Saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemrintah desa atau kabupaten. Awal usaha saya buka ssya di berikan bantuan dana dari KODIM sebesar rp.1.000.000 .kalau dari pemerintah desa atau kabupaten tidak pernah.
	Sejauh ini bantuan apa yang paling berdampak bagi usaha bapak/ibu?	Tidak ada bantuan yang paling berdampak karena saya tidak mendapatkan bantuan
	Apakah anda pernah mengikuti program pemerintah seperti pelatihan, bantuan modal, atau pendampingan usaha?	Saya tidak pernah mengikuti pelatihan apapun dan tidak pernah mendapatrkan bantuan modal saya juga tidak tahu kalua ada program pemerintah

		desa untuk kami yang punya usaha.
Evaluasi program pemerintah	Apa harapan bapak/ibu untuk program pemerintah kedepannya ?	Harapan saya kedepan, coba pemerintah desa lebih focus ke kami yang memiliki usaha yang kecil-kecilan ini yang membutuhkan. Saya ingin pemerintah mengadakan program yang dapat membenatu kami misalnya pelatihan cara menghitung keuntungan dan pemasaran lewat hp.
	Apakah bapak/ibu membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah? (dalam bentuk apa)	Saya secara pribadi butuh dukungan dari pmerintah, karena saya masih banyak kekurangan, saya butuh pelatihan usaha misalnya membuat kemasan produk yang menarik, pemasaran online.membantu dalam segi dana untuk modal.
	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan legalitas usaha/surat izin usaha dari pemerintah desa/kabupaten?	Belum, saya belum memiliki surat izin usaha. Saya sempat dulu ditawarkan untuk dibuatkan surat izin usaha cuman sampai sekarang saya belum ada dapat surat izin usaha.

	Apakah bapak/ibu sudah merasa bahwa pemerintah sudah cukup hadir dalam pemberdayaan umkm di desa tengkapak?	Kalua saya masih belum cukup karena masih banyak dari kami yang punya usaha ni tidak dijangkau, pemerintah desa hanya dating mendata-data kami aja tapi tidak mendapat apa-apa.
saran	Apa saran bapak/ibu kepada pemerintah desa untuk lebih mengembangkan sector umkm di desa tengkapak?	Saran saya untuk pemerintah desa, mendata semua kami punya usaha di des ani, supaya pemerintah desa juga tahu kondosi kami dan kebutuhan kami masing-masing. Kalua bisa pemerintah desa juga ajak kami untuk ikut pameran atau bazar di luar desa supaya produk-produk kami ni juga bisa dikenal orang. Dan kalua bisa buatlah anggran untuk kami supaya kami bisa kembangkan usaha kami ni.

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

Hasil Wawancara

Pelaku Umkm Desa Tengkapak

Nama : miana padan
Jenis kelamin : perempuan
Nama usaha : sanggar tari lelung
Lama usaha : 7 tahun
Jenis produk : kerajinan tangan
Jumlah karyawan : -

indikator	dimensi	uraian
Latar belakang dan kondisi pelaku umkm	Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu dalam memulai usaha ini?	Motivasi saya untuk memulai usaha saya ini karena saya ingin melestarikan budaya suku Dayak karena usaha saya ini kan kerajinan tangan Dayak, saya dari kecil sudah diajarkan oleh orangtua saya untuk membuat kranjang dari rotan, membuat gelang manik dan yang lainnya lah. Saya ingin anak-anak muda untuk melestarikan budaya orang Dayak bukan cuman di kesenian saja tapi juga dikerajinan tangan ini.
	Berapa penghasilan penjualan bapak/ibu dalam sebulan?	Kalau penghasilan saya tidak menentu ya tergantung musim ramailah, kadang penghasilan saya ini kalau ada job nari, atau

		orang datang sewa barang saya aja, ya kalau dihitung-hitung tu untuk sebulan gk sampai 1 juta, karena kan tidak nentu juga orang datang.
	Sejauh ini apa yang menjadi tantangan bapak/ibu dalam menjalankan usaha ini?	Saya juga tidak tahu apa yang menjadi tantangan saya, paling dari segi pemasaran produk aja kali, selain itu juga di SDM nya karena tidak banyak kan anak muda sekarang yang tertarik dengan budaya lokal. Mereka lebih suka mengikuti perkembangan jaman ikut-ikutan gaya orang luar. Itu aja sih
Akses terhadap program pemerintah	Apakah bapak/ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah desa/kabupaten? Dan apa saja bentuk bantuan yang anda terima?	Ya saya pernah dapat bantuan dari desa tapi berupa pelatihan saja, itupun waktu saya memulai usaha saya ini. Saya belum begitu diperhatikan oleh pemerintah, tapi lama-lama saya mulai dilibatkan oleh desa untuk mengikuti pameran dan grup sanggar tari saya juga sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
	Sejauh ini bantuan apa yang paling berdampak bagi usaha bapak/ibu?	Sejauh ini bantuan yang paling berdampak itu ya paling di kasih kesempatan untuk mengikuti pameran UMKM.

	Apakah anda pernah mengikuti program pemerintah seperti pelatihan, bantuan modal, atau pendampingan usaha?	Sudah pernah saya ikut beberapa kali pelatihan dari pemerintah.
Evaluasi program pemerintah	Apa harapan bapak/ibu untuk program pemerintah kedepannya ?	Harapan saya pemerintah bisa bantu untu membuka akses pasar yang lebih luas supaya produk kami bisa dikenal orang luar. Terus untuk program-program yang dibuat tu kalau bisa jangan cuman sekedar program aja itu harus dilaksanakan.
	Apakah bapak/ibu membutuhkan dukungan khusus dari pemerintah? (dalam bentuk apa)	Tentu lah ,saya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah desa ni. Selain pelatihan-pelatihan yang saya ikuti saya juga butuh tempat khusus untuk menjual produk-produk saya seperti buatlah stan untuk di tempat yang ramai orang supaya produk kami ni juga terjual bah dan dikenal orang-orang.
	Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan legalitas usaha/surat izin usaha dari pemerintah desa/kabupaten?	Ya saya sudah memiliki surat izin usaha dari pemerintah kabupaten.
	Apakah bapak/ibu sudah merasa bahwa pemerintah sudah cukup hadir dalam pemberdayakan umkm di desa tengkapak?	Kalau boleh jujur, saya merasa pemerintah desa ni belum cukup hadir bagi masyarakat. Karena saya bangun usaha saya sendiri.

saran	Apa saran bapak/ibu kepada pemerintah desa untuk lebih mengembangkan sector umkm di desa tengkapak?	Saran saya untuk pemerintah desa supaya lebih aktiflah dalam mendukung kami yang punya usaha ini, kalau kita liat kan ada separuh pelaku umkm yang sudah lama punya usaha tapi pemerintah desa tidak perhatikan mereka. Pemerintah ni harus lebih dekat dengan pelaku umkm, bukan pas ada acara besar di desa saja, kalau pemerintah lebih dekat dengan pelaku usaha pasti mereka tahu apa yang dibutuhkan sama pelaku usaha tu.
-------	---	--



wawancara dengan pemerintah desa



Wawancara dengan nenek rut tuai



Wawancara dengan ibu sisilia

